

Gerakan Moderasi Islam Dalam Perspektif Deteksi Dini; Studi Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri

Ahmad Subakir,¹ Ahmad Khoirul Mustamir²

¹Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

³Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Indonesia

¹bakirkediri@gmail.com, ²khairulidr52@gmail.com

Abstract

This study discusses radicalism and deradicalism, and the Youth Movement (GP Ansor) which seized the attention of researchers and academics. They put up a fight by using the perspective of moderatism based on Ahlul Sunnah wal Jamaah an Nahdliyah and Indonesian values. This perspective was also carried out by all members of the Board of Management of the Ansor Youth Movement (PC GP Ansor) of Kediri City. This research is descriptive qualitative research with a case study approach. The results of this study indicate that GP Ansor of Kediri City is able to carry out resistance and early detection of radicalism in the City of Kediri. They tried to take over public places and facilities to spread the idea of Islam Ahlul Sunnah Wal Jamaah An Nahdhiyah.

Keywords: *Islamic Moderation Movement, Early Detection, GP Ansor .*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang radikalisme dan deradikalisme, dan Gerakan Pemuda (GP Ansor) yang menyita perhatian kalangan peneliti dan akademisi. Mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan perspektif moderatisme yang berlandaskan Ahlul Sunnah wal Jamaah an Nahdliyah dan ke-Indonesia-an. Cara pandang inipun dilakukan oleh seluruh anggota Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kota Kediri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GP Ansor Kota Kediri mampu melakukan perlawanan dan deteksi dini terhadap gerakan radikalisme di Kota Kediri. Mereka berusaha mengambil alih tempat-tempat keramaian dan fasilitas umum untuk menyebarkan gagasan Islam Ahlul Sunnah Wal Jamaah An Nahdhiyah.

Kata Kunci: *Gerakan Moderasi Islam, Deteksi Dini, Gerakan Pemuda Ansor*

Pendahuluan

Akhir-akhir ini, Gerakan Pemuda Ansor sedang menghadapi tantangan serangan kelompok-kelompok keagamaan yang anti dengan pemerintah secara diam-diam. Ansor mengkleim, kelompok keagamaan anti pemerintah (eks-HTI) melakukan tindakan-tindakan fitnah sampai persekusi.¹ Meski demikian, GP Ansor lantang menyuarakan perlawanan terhadap kelompok-kelompok radikalisme. Banyak kalangan menilai, GP

¹<https://makassar.tribunnews.com/2019/12/11/video-viral-kronologi-banser-nu-dipersekusi> di-pondok-pinang-dituding-kafir-hingga-disuruh-takbir diakses 20 Juni 2020

Ansor sebagai organisasi kepemudaan Islam yang begitu eksis dalam aksi preventif dalam menangkal gerakan radikalisme.²

Gerakan Pemuda Ansor atau sering dikenal dengan GP Ansor merupakan salah satu Badan Otonom (BANOM) Nahdlatul Ulama' (NU), suatu organisasi sosial yang bervisi kepada Kepemudaan dan Keagamaan. Salah satu komitmen GP Ansor yang selalu digemakan adalah mengawal eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu melawan setiap kelompok radikal dan anti-Pancasila yang berpotensi mengganggu ke-*bhineka*-an. Komitmen ini ditegaskan kembali oleh ketua umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dalam Harlah ke-83 Ansor, di Semarang Tahun 2017.³

Komitmen ini pun juga tertuang dalam tanggung jawab Barisan Ansor Serba Guna (BANSER) yaitu bersama dengan kekuatan bangsa yang lain untuk tetap menjaga dan menjamin keutuhan bangsa dari segala ancaman paham-paham radikalisme. Komitmen ini dapat kita amati dalam beberapa peran aktif GP Ansor selama ini yang tidak diragukan lagi, salah satunya adalah melakukan penjagaan ketat di pusat keramaian dan beberapa gereja seperti peristiwa pasca aksi terror bom bunuh diri di Kota Surabaya. Tri Rismaharini, Walikota Surabaya menyebutkan, program deradikalisasi dan deteksi dini terhadap gerakan radikalisme menggandeng Gerakan Pemuda Ansor.⁴

GP Ansor mempunyai cara yang berbeda untuk mengatasi radikalisme di setiap wilayahnya. seperti GP Ansor Wonoayu Sidoarjo cara mencegah radikalisme di wilayahnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menguatkan ideologi kebangsaan seperti "Ngaji Kebangsaan" pemasangan spanduk bertema bahaya radikalisasi bagi Bangsa Indonesia, menghidupkan tradisi-tradisi lokal seperti tahlilan rutin, al-barjanji, istighotsah, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi dengan menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulisan tentang penguatan ideology kebangsaan dan bahaya radikalisme. Selain itu, GP ansor Wonoayu juga memanfaatkan media sosial sebagai media yang paling efektif untuk

² Muhammad Ainun Najib, *Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor Dalam Deradikalisasi Keagamaan di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya: UINSA Suarabaya, 2019).

³ Bowo Pribadi, GP Ansor Tegaskan Lawan Radikalisme dan Anti-Pancasila, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/04/27/op2e22377-gp-ansor-tegaskanlawan-radikalisme-dan-antipancasila>, diakses Desember 2019

⁴ <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/osn9pc/tradisi-ramadhan> diakses Desember 2019

mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat luas khususnya para pemuda yang paling rentan terpengaruh oleh berbagai paham aliran radikal.⁵

Adapun upaya-upaya diatas merupakan contoh peran yang ditunjukkan GP Ansor Sidoarjo untuk mencegah deradikalisasi dan deteksi dini terhadap gerakan radikalisme diwilayahnya. Meski demikian, upaya lain yang dilakukan GP Ansor adalah berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok radikalisme, seperti yang terjadi pada tanggal 4 Maret 2017 di Sidoarjo yaitu memberikan surat keberatan diadakannya pengajian di Masjid Shalahuddin Gedangan Sidoarjo dengan pembicara Ustadz Khalid Basalamah. Berdasarkan pengamatan GP Ansor melalui ceramahnya, ustadz tersebut terkenal sebagai ustadz beraliran *Hizbut Tahrir Indonesia* (HTI) karena ustadz tersebut dalam ceramahnya seringkali menyalahkan aliran lain tanpa memahami duduk permasalahan dan mensyirikkan tanpa perbandingan dalil. Hal ini menunjukkan bahwa Ustadz tersebut tidak menghargai perbedaan.⁶

Penolakan GP Ansor terhadap ustadz khalid basalamah dibuktikan dengan memberikan bukti CD rekaman ceramah ustadz Basalamah yang memprovokasi umat kepada pengurus pengajian. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh panitia/pengurus pengajian. Ketika pengajian berlangsung PC GP Ansor Sidoarjo beserta BANSER (Barisan Ansor Serbaguna) mendatangi masjid tersebut untuk mencegah apabila ceramah Ustadz Khalid Basalamah berisi provokasi.

Selain itu, kasus serupa terjadi pada bulan September 2018 oleh seorang ustadz muallaf yang akan melakukan pengajian di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Ustadz tersebut bernama Ustadz Bangun Samudra. Namun, ustadz tersebut dicurigai oleh PC GP Ansor berdasarkan beberapa video yang ada di youtube bahwa isi materi dakwah ustadz Bangun Samudra membenarkan tindakan kekerasan dengan alasan jihad layaknya ustadz Basalamah. Sehingga pengajian tersebut dibatalkan karena PC GP Ansor Sidoarjo telah melaporkan pada Kapolres dan pihak-pihak yang bersangkutan bahwa pengajiannya dirasa tidak tepat.⁷

GP Ansor Kota Kediri pun juga demikian, Wazid Husni, Ketua GP Ansor Kota Kediri saat ini, banyak melakukan perlawanan terhadap kelompok radikalisme. Ketika peristiwa pembakaran bendera HTI di Jawa Barat bebepa waktu silam. Peristiwa

⁵ Muhammad Ainun Najib, *Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor Dalam Deradikalisasi Keagamaan di Kecamatan Wonoayu Kabupeten Sidoarjo*, (Surabaya: UINSA Surabaya, 2019).

⁶ Hasil Wawancara dengan Mukhamad Iqbal, sekretari PC GP Ansor Kabupaten Sodoarjo, pada 23 Desember 2019

⁷ Hasil Wawancara dengan Danang Anggota Banser GP Ansor Sidoarjo.

pembakaran tersebut mendapat respon dari pemuda HTI dari Kelurahan Blabak Kota Kediri. Ihsanul Faruqi dalam unggahan di You Tube sengaja mengancam akan melakukan perlawanan dengan fisik kepada anggota Ansor. Saat itu, GP Ansor Kota Kediri memilih sikap untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.⁸

Usaha lain untuk mendeteksi gerakan radikalisme oleh GP Ansor Kota Kediri adalah Brother Fest yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 Juli 2020 Di Gor Joyoboyo dengan tujuan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Namun, acara tersebut dibatalkan karena para pembicaranya merupakan mantan anggota HTI yang telah dibubarkan pemerintah.⁹

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang gerak GP Ansor Kota Kediri dalam usaha mendeteksi dan melawan kelompok radikalisme di Kota Kediri.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran organisasi kepemudaan GP Ansor Kota Kediri dalam menyemai paham moderatisme di wilayah Kediri. Riyanto mendefinisikan penelitian studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unsur sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi objek yaitu GP Ansor Kota Kediri melalui pengumpulan data yang rinci dan mendalam mencakup multi sumber informasi yang kaya dengan konteks. Kasus yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah sesuai dengan fokus penelitian yaitu peran GP Ansor dalam Implementasi Gerakan Moderasi Islam Dalam Perspektif Deteksi Dini.

Hasil dan Pembahasan

Radikalisme Dan Gerakannya

Gerakan sosial keagamaan HTI di Indonesia memiliki massa yang tidak sedikit. Sejak diterbitkannya PERPU No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, izin operasional gerakan sosial tersebut telah dicabut oleh pemerintah. Karena ditemukan

⁸ Wawancara dengan Wazid Husni, 30 Desember 2019

⁹ Didik Mashudi, Diduga Pendakwah Berpaham Radikal, Dua Ponpes Menolak Kegiatan Brothers Fest 2019 di Kota Kediri, <https://surabaya.tribunnews.com/2019/06/27/diduga-pendakwah-berpaham-radikal-dua-ponpes-menolak-kegiatan-brothers-fest-2019-di-kota-kediri>. diakses 25 Desember 2019

ideologi HTI yang ingin mengubah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Pancasila. Hal ini dapat dibuktikan dengan] banyak penceramah dari HTI mendakwah tentang ideologi HTI dengan nuansa *hate speech* yang ditujukan untuk pemerintah Indonesia.¹⁰

HTI sebagai gerakan islam trans-nasional telah mengubah pandangan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang bermula secara eksplisit telah mengkafirkan Pancasila pada tahun 1990 menjadi *set of philosophy* pada tahun 2012 yakni sebuah rangkaian filsafat buatan manusia. Dengan demikian, dapat dipahami kepada khalayak umum bahwa status Pancasila tetap berada di bawah Islam meskipun filsafatnya buatan manusia.¹¹ Pandangan ini tentu dapat memicu konflik ideologis yang serius di Kota Kediri, dimana masyarakatnya sangat majemuk.

Upaya infiltrasi gerakan HTI di Kota Kediri sejatinya dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu infiltrasi melalui kegiatan-kegiatan di masjid, kegiatan institusi, dan kegiatan politis. Beberapa masjid di kota Kediri secara umum membuktikan bahwa dalam derajat yang beragam kelompok HTI telah menggunakan masjid sebagai kendaraan bagi penyebaran ideologinya. Level intensitas yang tinggi dari radikalisasi terlihat di Masjid Agung Kota Kediri dan Masjid Baiturahman yang masing-masing berafiliasi kepada HTI meskipun beberapa kelompok Islam lainnya juga menggunakannya sebagai hal yang sama. Radikalisasi juga cukup tinggi di masjid terbuka dan tidak berafiliasi dengan ormas tertentu, yaitu Masjid Al-Muttaqien, Ngronggo. Sementara masjid-masjid umum lainnya yang dijadikan penelitian juga memperlihatkan kemunculan ideologi Islam radikal dengan level intensitas yang lebih rendah, Misalnya Masjid Pesantren Jamsaren, Masjid Komplek Al-Hikmah Banjaran dan, dan Masjid Kampus di Universitas Nusantara (UNP) PGRI Kediri.¹²

Aspek keterbukaan jamaah di beberapa masjid wilayah Kediri umumnya terbuka kepada semua kalangan, kecuali Masjid Agung Kota Kediri dan Al-Muttaqien Ngronggo yang memiliki jama'ah eksklusif yang merupakan jama'ah tetap yang mendapatkan model pengajian terstruktur dan cenderung tertutup. Jama'ah masjid yang memiliki keterbukaan semua kalangan seperti jama'ah masjid al-Hikmah berasal dari pengurus dan para imam masjid di lingkungannya sehingga diperkirakan memiliki pengaruh terhadap

¹⁰ Islam dan Syueb, "Analisis Wacana Kritis Konsepsi Relasi Agama dan Negara Hizbut Tahrir Indonesia."

¹¹ Arif, "Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila."

¹² Wawancara dengan Wazid Husni, ketua PC GP Ansor Kota Kediri pada 30 Desember 2019

corak dakwah di masjidnya masing-masing. Sementara itu, yang mengikuti pengajian rutin di masjid Baiturrahman dan Masjid Agung Kota Kediri merupakan calon da'i atau khatib yang telah dibekali dengan ajaran dan ideologi HTI yang menekankan pentingnya totalitas dalam berIslam (*kaffah*).¹³

Dakwah masjid-masjid dibawah naungan HTI dipantau dengan sangat kuat oleh pengurusnya. Keputusan tentang khatib/penceramah serta materi khutbah dan pengajian ditentukan secara otoritatif oleh ustadz yang sekaligus pimpinan pesantren yang memayungi masing-masing masjid tersebut. Di sisi lain, masjid-masjid yang dikelola oleh aktivis NU dan Muhammadiyah menjalankan fungsi kontrol yang tidak seketat kedua masjid di atas.

Berbeda dengan masjid yang dikelola HTI,] masjid-masjid yang dikelola pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama RI) pemantauan dilakukan dari jauh pada khatib dan isi khutbah jumat, sedangkan untuk ceramah dan kegiatan pengajian di luar itu lebih longgar sehingga berbagai anasir radikal bisa menggunakan masjid untuk ajang dakwah. Penting untuk dicatat, bahwa tanpa adanya peningkatan kontrol dikhawatirkan tercipta keadaan yang beresiko terhadap infiltrasi ideologi radikal HTI.

Adapun persepsi sikap dan perilaku pengurus masjid dan jama'ah masjid terhadap lima isu ideologis yaitu sistem pemerintahan, formalisasi syari'at Islam, jihad, kesetaraan gender dan pluralisme secara umum sangat beragam. Namun demikian, masih cukup banyak informan yang mewakili persepsi dan sikap Islam radikal, dalam pengertian mendukung penegakkan *khilafah islamiyyah*, menyetujui formalisasi syari'at Islam melalui negara, menolak pluralisme dan kesetaraan gender, dan seterusnya. Dari aspek sistem pemerintahan, misalnya, cukup banyak *stake holder* masjid yang mendukung ide pendirian khilafah Islamiyah dan pada saat yang sama menolak demokrasi.

Berbanding terbalik dengan kelompok-kelompok radikal yang intens menjalankan dakwahnya, kalangan moderat kurang tegas mendakwahkan moderasi Islam bahkan di masjid-masjid yang mereka kelola sendiri. Alhasil, persepsi Islam radikal pun akan leluasa berkembang. Upaya-upaya sistematis dan strategis dari pihak yang berwenang dan para barisan pendukung Islam moderat sangat diperlukan dimasa depan untuk menjaga dan membela eksistensi masjid sebagai basis pengajaran dan dakwah Islam moderat.

¹³ Wawancara dengan Chandra, Wakil Ketua PC GP Ansor Koata Kediri pada 30 Desember 2019

HTI juga melaksanakan dakwahnya melalui instansi, terutama melalui instansi Pendidikan. Beberapa SMA di Kota Kediri terindikasi telah menjadi tempat subur bagi tumbuhnya ideologi-ideologi HTI, walaupun tidak mengarah kepada hal-hal yang menuju konsep tegaknya khilafah. Kebanyakan ide yang dikembangkan di SMA adalah seputar ajakan untuk langsung mengembalikan seluruh persoalan yang dihadapi kepada Al Qur'an dan Al Hadist. Infiltrasi ideologi ini disisipkan melalui kegiatan ekstrakurikuler siswa semacam ekstra kerohanian atau kelompok kajian Islam yang ada di sekolah.¹⁴

Di beberapa pendidikan tinggi juga sering ditemukan adanya halaqah-halaqah yang secara implisit mengkaji tentang ide-ide HTI. Halaqah ini ada yang bersifat independen, ada pula yang merasuk ke dalam Unit Kegiatan Mahasiswa. Selain itu, keberadaan buletin-buletin yang berisikan ajaran serta ideologi HTI juga sering ditemukan di sekitar kampus-kampus di wilayah Kota Kediri. Penulis telah berhasil menemukan buletin-buletin tersebut terutama di masjid-masjid sekitar kampus, yang sering juga digunakan untuk berdiskusi para mahasiswa.

Iklm perkuliahan yang ada di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sangat terbuka dengan adanya berbagai diskursus keislaman. Tidak menutup kemungkinan bahwa kajian-kajian yang dilakukan oleh mahasiswa juga berpotensi disisipi ide-ide gerakan sosial keagamaan HTI yang terkenal sangat sistematis dan logis tersebut. Hal ini tidak mengherankan karena pada jenjang pendidikan tinggi memang mayoritas mahasiswa telah menuju masa kedewasaan, sehingga pemikirannya juga telah berkembang. Karena itu, pembelajarannya juga bersifat andragogis, bukan pedagogis.¹⁵ Pembelajaran mandiri akan lebih memungkinkan mahasiswa untuk mengkaji ide-ide yang mereka terima secara lebih mendalam.

Ketika membaca kegiatan Hizbut Tahrir dalam perspektif perubahan sosial maka Hizbut Tahrir sesungguhnya sedang melakukan dakwah. Dakwah terbagi menjadi tiga macam. *Pertama*, dakwah *fikriyah*, dakwah melalui penyebaran pemikiran untuk menanamkan pemikiran Islam dan menghancurkan atau membantah pemikiran yang tidak islami. *Kedua*, dakwah *siyasiyah*, dakwah yang digerakkan untuk tercapainya tujuan politik yakni tegaknya syariah dan Khilafah. *Ketiga*, dakwah *askariyah*, dakwah melalui

¹⁴ Wawancara dengan Zainuri, Wakil Ketua PC GP Ansor Kota Kediri pada 30 Desember 2019

¹⁵ Sufirmansyah Sufirmansyah, "Actualization of Andragogical Learning Strategies for Higher Education in Disruption Era," *Didaktika Religia* 6, no. 2 (2018): 351–70.

kekuatan militer atau jihad *fisabilillah*.¹⁶ Adapun dakwah yang digunakan Hizbut Tahrir adalah dakwah *fikriyah* dan dakwah *siyasiyah*.

Dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir dilakukan berbagai *uslub* (cara) dan *wasilah* (sarana) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dilakukan secara langsung. Dakwah secara langsung diantaranya melalui forum-forum publik seperti seminar, diskusi, talkshow, tabligh akbar, khutbah Jum'at, pengajian-pengajian dan lain sebagainya yang dilakukan di berbagai wilayah di Kediri. Sedangkan [dakwah] secara tidak langsung adalah melalui media cetak, misalnya melalui majalah Al-Wa'ie yang terbit sebulan sekali buletin Al Islam yang terbit setiap Jum'at yang tirasnya sekarang sudah lebih dari satu juta eksemplar. Tabloid Media Umat yang terbit sebulan dua kali yang tirasnya sekarang 30 ribu eksemplar dan artikel-artikel lain seperti www.hizbut-tahrir.or.id yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.¹⁷

Dakwah ala HTI masih banyak ditemui di Kediri meskipun eksistensinya sulit ditemukan. Hal ini dikarenakan mereka berdakwah secara implisit yang masuk melalui celah-celah kegiatan yang bersifat umum dan pembahasan dengan tema ketauhidan secara global. Cara dakwah tersebut beralasan karena mereka khawatir akan keselamatannya pasca diterbitkannya Perppu mengenai Ormas. Meskipun Para aktifis HTI tidak pernah menampakkan dirinya secara langsung, namun tetap konsisten dalam mendakwahkan idenya. Cara penyampaiannya juga diperhalus sehingga masyarakat sulit menjustifikasikan apakah mereka anggota HTI atau bukan.

GP Ansor Kota Kediri Menangkal Radikalisme

1. Konsep Moderasi Dalam Perspektif GP Ansor

Moderasi Islam secara konsep bisa dirujuk dalam Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Istilah moderasi Islam dalam Bahasa Arab sepadan dengan kata *al-Wasathiyyah al-Islamiyyah*. Al Qardawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya termasuk kata *tawazun*, *i'tidal*, *ta'adul* dan *istiqamah*. Sementara dalam bahasa Inggris disebutkan dengan *Islamic Moderation*. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang.

¹⁶ Agus Heri, HTI Menjalankan Fungsi Partai Politik, 22 Mei 2019.

¹⁷ Devi Novitasari, HTI hanya Dicaput Izinnya, Bukan Dibubarkan Pemerintah, 1 Mei 2019.

Senada dengan konsep di atas, moderasi menurut Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft* adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Multikulturalisme di Indonesia, merumuskan bahwa moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-maslahah al-'ammah*. Dalam penerapannya, Gus Dur menjelaskan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip universal dalam berbangsa dan bernegara. Konsep ini sejalan dengan garis besar prinsip keagamaan dan kebangsaan Pengurus Besar Nahdhotul Ulama (PBNU).

Ansor sebagai Banon NU juga memahami moderasi Islam sama dengan PBNU. Ansor berpandangan bahwa Islam harus bersikap moderat dalam menyikapi setiap persoalan, bahkan prinsip moderasi ini menjadi karakteristik Islam dalam merespon segala persoalan. Diajarkan ajaran Rasulullah SAW dalam berdakwah melarang umatnya untuk tidak terlalu berlebihan meski dalam menjalankan agama sekalipun. Beliau lebih senang jika hal tersebut dilakukan secara wajar tanpa adanya pemaksaan diri dari yang berlebihan. Hal ini tentu berbeda dengan cara pandang keagamaan yang selalu memaksa dan cenderung keras, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal atau ekstrimis.

Pandangan moderasi Islam yang dipahami NU oleh GP Ansor Kediri, dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengidentifikasi dan melawan gerakan radikalisme. Jika dilihat lebih jauh, al-Wasathiyah Islamiyyah mengapresiasi unsur *rabbaniyyah* (ketuhanan) dan *insaniyyah* (kemanusiaan), mengkombinasi antara *maddiyyah* (materialisme) dan *ruhiyyah* (*spiritualisme*), menggabungkan antara wahyu (*revelation*) dan akal (*reason*), antara masalah amah (*al-jamā'iyyah*) dan masalah individu (*al-fardiyyah*).

Menurut GP Ansor, bahwa moderasi biasa diistilahkan dengan *wasath* atau *wasathiyah*; orangnya disebut wasit. Kata wasit sendiri diserap dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu: a, penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), b, peleraai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan c, pemimpin di pertandingan. Hal ini sesuai dengan pandangan KH Said Aqil Siroj, yang menyatakan "sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada tengah-

tengah".¹⁸ Pemahaman ini diturunkan dalam beberapa program pencegahan dan deteksi gerakan radikalisme di Kota Kediri.

2. Kopi Cengkir ala GP Ansor

Konsep "Kopi Cengkir" dimotori oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PC GP Ansor Kota Kediri. Kegiatan diskusi ini merupakan bentuk nyata memamntabkan paham *ahullussunah waljamaah annahdhiyah* bagi anggota Ansor dan Banser Kota Kediri. Kajian ini sering membahas beberapa gerakan radikalisme di Kota Kediri dan merumuskan strategi tentatif untuk melawan gerakan radikalisme.

Kegiatan Kopi Cangkir ini dilaksanakan secara berkala yaitu 2 minggu sekali setiap malam Jum'at Tempat kegiatan diskusi dilakukan secara fleksibel, Namun lebih sering dilakukan di Kantor PC NU Kota Kediri. Kegiatan ini menghadirkan pematik diskusi dari berbagai kalangan pondok pesantren, kepolisian dan pemerintahan di lingkup Kota Kediri. Adapun Peserta diskusi adalah anggota Ansor Banser Kota Kediri dan perwakilan Banom-Banom NU di Kota Kediri].

Kegiatan diskusi tersebut membahas tentang bahaya radikalisme atau masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini (khususnya materi tentang menurunnya rasa nasionalisme) dan berada pada tingkat yang rendah karena maraknya gerakan radikalisme pada saat ini, sehingga tingkat radikalisme pada Indonesia menjadi tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gus Wazid Husni selaku Ketua PC GP Ansor Kota Kediri yang menyatakan, "*Kami ikut memberikan materi pada para sahabat-sahabat. Materi yang diberikan berkaitan dengan keadaan Negara Indonesia saat ini, dan menunjukkan bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia menurun karena maraknya gerakan radikalisme yang marak saat ini, sehingga tingkat radikalisme pada Negara Indonesia menjadi tinggi.*"¹⁹

3. Pengajian Di Pusat-Pusat Pembelanjaan di Kota Kediri

Kajian ini dimotori oleh Majelis Dzikir dan Sholawat (MDS) Rijalul Ansor PC GP Ansor Kota Kediri. Kajian ini dibingkai dalam pengajian umum yang melibatkan khalayak umum. Target dakwahnya adalah kalangan pemuda milenial dengan tujuan untuk membentengi generasi muda dari paham-paham radikal.

¹⁸ Pidato Said Aqil Shiroj, dikutip oleh Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), h.13

¹⁹ Wawancara dengan Wazid Husni, Ketua GP Ansor Koata Kediri Tanggal 30 Desember 2019

Tujuan lain dari kegiatan ini adalah membangun kesadaran beragama Islam berpaham *ahlussunah waljamaah annahdliyah* yang dibingkai acara ngaji kebangsaan. Dengan kata lain, menyeimbangkan *ukhuwah Islamiyah* yaitu menjalin hubungan baik dengan sesama umat muslim, dan *ukhuwah wathoniyah* yaitu menjalin hubungan baik dengan sesama Bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zainuril selaku wakil ketua PC GP Ansor Kota Kediri yang menyatakan, “*dalam kegiatan ngaji kebangsaan ini, perlu dilaksanakan di tempat-tempat pembelanjaan Kota Kediri. Pilihan strategi ini untuk menjangking kepada kelompok melenial, yang menurut data banyak anak-anak muda yang terpapar paham radikalisme.*”²⁰ Ngaji kebangsaan adalah kegiatan yang bersifat kontekstual yang bertujuan agar generasi muda mampu menyeimbangkan *ukhuwah Islamiyah*, *wathoniyah*, dan *basyariyah*. Dikatakan kontekstual karena materi pengajian tidak tetap dan menyesuaikan dengan peristiwa apa yang sedang terjadi saat ini.

Adapun materi ngaji yang diberikan dikaitkan dengan fenomena saat ini yaitu hubungan antara nasionalisme dengan radikalisme. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muhammad Chandar selaku wakil ketua PC GP Ansor Kota Kediri yang menyatakan, “*Ngaji kebangsaan adalah kegiatan yang bersifat kontekstual. dikatakan kontekstual karena materi pengajian ganti-ganti menyesuaikan dengan peristiwa apa yang sedang terjadi saat ini*”.²¹ Dalam pengajian ini, juga dijelaskan seputar ideologi Negara Indonesia dari hal yang dasar sampai ke umum dan selalu mengaitkan materi dengan rasa kecintaan pada tanah air. Selain itu, menjelaskan tentang *ukhuwah wathoniyah* yaitu bagaimana untuk menjalin hubungan berbangsa dan *ukhuwah basyariyah* yaitu menunjukkan nilai-nilai toleransi antar sesama. Jadi, jika dua hal tersebut sudah tertanam pada diri seseorang, maka ia tidak akan terpapar dengan radikalisme.

4. Koordinasi dan Pengambilan Sikap Bersama Polres Kediri Kota

Hubungan PC GP Ansor Kota Kediri dan Polres Kediri Kota selalu bersama-sama dalam menghadapi isu-isu tentang radikalisme di Kota Kediri. GP Ansor Kota Kediri, GP Ansor Kota Kediri dalam tindakannya terkesan lambat karena selain harus berkoordinasi dengan polisi juga berkoordinasi dengan para ulama di Kota Kediri.

Tindakan GP Ansor Kota Kediri lambat terlihat dalam penanganan isu radikal yaitu dampak pembakaran Bendera HTI di Garut dan penyebaran paham radikalisme di Gor

²⁰ Wawancara dengan Zainuri, 30 Desember 2019

²¹ Wawancara deng Chandra, 31 Desember 2019

Jayabaya Kota Kediri. Kasus pembakaran bendera HTI telah tersebar di beberapa media social hingga mendapat respon dari salah satu anggota HTI dari Kota Kediri yang mengancam akan memberikan perlawanan baik secara pribadi atau keorganisasian kepada seseorang yang telah membakar bendera HTI melalui akun media sosialnya. Ancaman perlawanan tersebut ternyata meresahkan warga Kediri dan sekitarnya yang menunjukkan bahwa orang-orang radikal sudah banyak di Kota Kediri.

Akibat video tersebut, banyak anggota Banser hendak melakukan tindakan tabayun (klarifikasi secara kekeluargaan). Menanggapi hal tersebut, Ketua GP Ansor Kota Kediri mengirim surat kepada Kapolres Kediri Kota untuk melakukan tindakan yang dilakukan oleh Ihsanul Faruqi. Menurut Bagus Wibowo,²² Ketua LBH Ansor Kota Kediri video Ihsanul Faruqi mampu dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (2): “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*”²³

Meski demikian, PC GP Ansor Kota Kediri memahami lebih penting harmonisasi masyarakat Kota Kediri. Berdasarkan respon surat GP Ansor Kota Kediri dari kapolres bahwa permasalahan ini apabila ditindaklanjuti, besar kemungkinan akan terjadi *cheos* di wilayah Kota Kediri. Menurut Ponidi Kasat Intelkam Kediri Kota jika ini dilanjutkan besar potensi disharmonitas di Kediri akan benar-benar terjadi. Karena, data yang diperoleh intel, bahwa banyak sekali anggota HTI di Kota Kediri, meskipun tidak nampak di permukaan. Menanggapi sikap polisi tersebut, PC GP Ansor Kota Kediri lebih mengedepankan kemaslahatan umat yang lebih besar.²⁴

Keterlambatan penanganan selanjutnya adalah penyebaran paham radikalisme pada acara Brother Fest 2019 di Gor Jayabaya Kota Kediri. Acara tersebut dicurigai oleh GP Ansor sebagai rencana penyebaran paham HTI di Gor Jayabaya oleh Yayasan Sayap Dakwah Organizer 13-14 Juli 2019. Kecurigaan tersebut karena GP Ansor Kota Kediri menduga pembicara acara Brother Fest 2019 adalah eks anggota HTI yang telah dibubarkan pemerintah. Tindak lanjut dari kecurigaan tersebut GP Ansor mengirim surat penolakan kepada Kapolres Kediri Kota, Walikota Kediri dan Departemen Pemuda dan

²² Wawancara dengan Bagus Wibowo, Ketua LBH Ansor Kota Kediri, 31 Desember 2019

²³ Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

²⁴ Dokumen Berita Acara Koordinasi LBH Ansor Kota Kediri, Naskah Tidak diterbitkan

Olehraga sebagai pengelola Gor Jayabaya. Penolakan ini juga mendapat dukungan dari dua Pondok Pesantren Besar Di Kediri, yaitu Pondok Pesantren Lirboyo dan Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri karena dikhawatirkan acara tersebut akan disusupi dan ditunggangi anggota eks HTI. Surat tersebut ternyata mendapat respon dan tindak lanjut dari pihak-pihak yang dimaksud sehingga acara tersebut dibatalkan. GP Ansor dalam melakukan penolakan tidak melakukan cara-cara anarkis, mereka akan melibatkan pihak berwajib dan terkait untuk bersama-sama memerangi radikalisme dengan cara yang baik untuk kemaslahatan bersama sehingga tindak lanjut GP Ansor dinilai terlambat.

5. Memperkuat Kaderisasi Di Lingkup Ansor Kota Kediri

Sejalan dengan penanaman ideologi *ahlusunnah waljamaah an nahdhiyah* kepada masyarakat, PC GP Ansor Kota Kediri mengadakan acara pelatihan untuk merekrut anggota. Acara tersebut dilaksanakan secara formal oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri. Melalui kegiatan DIKLATSAR (Pendidikan dan Pelatihan Dasar).

Adapun syarat menjadi peserta] yaitu memiliki pengetahuan dan fisik yang cukup dengan tujuan agar menjadi anggota BANSER yang dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Hal ini, diharapkan agar anggota mengerti bahwa untuk mempertahankan Negara Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga setiap anggota berupaya untuk meningkatkan rasa nasionalismenya masing-masing.

Diklatsar adalah suatu langkah yang harus ditempuh oleh seseorang agar bisa menjadi anggota Banser. Adapun tujuan diadakannya kegiatan Diklatsar ini adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme para anggota Banser dan para peserta Diklatsar terutama agar mereka bisa menangkal radikalisme yang marak pada saat ini dengan berbekal pengetahuan dan fisik yang cukup. Menurut Wazid Husni, peserta diklatsar harus siap berhadapan dengan kelompok-kelompok radikal dimanapun dan kapanpun. Terlebih lagi, saat ini Ansor Banser dihujat baik secara langsung atau tidak oleh orang-orang yang betpahaman radikal.

Kesimpulan

Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri menjadikan Moderasi Islam sebagai perspektif dalam melakukan perlawanan dan deteksi dini terhadap paham radikal di Kota Kediri. Moderasi Islam dimaknasi sesuai dengan ideologi Ahlussunah wal Jamaah An Nahdliyah.

Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri dalam menjalankan programnya berkoordinasi dengan para Ulama di Kota Kediri, pemerintah Kota Kediri dan keamanan Kota Kediri. Sementara cara yang dilakukan menyemai paham moderasi Islam ahlussunnah wal jamaah annahdhiyah dan menangkal penyebaran radikalisme di Kota Kediri dengan cara, perekrutan anggota, pengajian di tempat-tempat pembelanjaan moderan di Kota Kediri dan Kajian berkala yang disebut dengan “Kopi Cengkir.”

Daftar Pustaka

- Arif, Syaiful. “Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila.” *Jurnal Keamanan Nasional* 11, no. 1 (2016): 19–34.
- Arifan, Fadh Ahmad. “Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia.” *Jurnal Studi Sosial* 6, no. 2 (2014): 94–102.
- Arifin, Muhammad. Cara Dakwah HTI yang Semakin Halus, 17 Mei 2019.
- Arifin, Syamsul. “Gerakan Keagamaan Baru dalam Indonesia Kontemporer: Tafsir Sosial atas Hizbut Tahrir.” *At-Tahrir* 14, no. 1 (2014): 117–38.
- . “Pertautan Agama Dalam Ideologi dan Gerakan Sosial: Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia.” *Akademika* 18, no. 2 (2006): 20.
- Burhan, Falka. “Analisis wacana Terhadap Teks Berita Pembubaran HTI pada Media Online Liputan6.com Terbitan Mei-Juli Tahun 2017.” *Jurnalisa* 3, no. 1 (2017): 121–35.
- Burhani, Ahmad Najib. “The Banning of Hizbut Tahrir and the Consolidation of Democracy in Indonesia.” *ISEAS Perspective* 7, no. 1 (2017): 1–10.
- Coser, Lewis A. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press, 1956.
- Damaitu, Emanuel Raja. “Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat.” *Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 150–63.
- Dawson, Lorne L. “Who Joins New Religious Movements and Why: Twenty Years of Research and What Have We Learned?” Dalam *Cults and New Religious Movements: A Reader*, disunting oleh Lorne L. Dawson. New Jersey: Blackwell Publishing, 2003.
- Dodi, Limas. “Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser dalam Teori Fungsional tentang Konflik (Konsekuensi Logis dari sebuah Interaksi di antara Pihak Jamaah LDII dengan Masyarakat sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang).” *Al-’Adl* 10, no. 1 (2017): 104–24.
- Hayati, Nilda. “Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia: Kajian Living Al-Quran Perspektif Komunikasi.” *Episteme* 12, no. 1 (2017): 172.
- Heri, Agus. HTI Menjalankan Fungsi Partai Politik, 22 Mei 2019.
- Hilmy, Masdar. “Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).” *Islamica* 6, no. 1 (2011): 3.

- Irkhami, Nafis. "The Economic-Political Concept of Hizbut Tahrir Indonesia: Reflection on The Early Islamic Thoughts." *IJIMS (Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies)* 4, no. 1 (2014): 105–34.
- Islam, Mufatihatul, dan Sudono Syueb. "Analisis Wacana Kritis Konsepsi Relasi Agama dan Negara Hizbut Tahrir Indonesia." *Jurnal Kajian Agama* 1, no. 2 (2015): 111–21.
- Jamilah, Sitti. "Gerakan Hizbut Tahrir Di Kota Pare-Pare (Membaca Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani)." *Jurnal Diskursus Islam* 3, no. 1 (2015): 1–19.
- Jonkennedi, Jonkennedi. "Gerakan Hizbut Tahrir dan Realitas Politik Islam Kontemporer di Indonesia." *Komunika* 6, no. 1 (2012): 149.
- Lev, Daniel S. *Transition To Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*. New York: Cornell University, 1966.
- Lofland, John. *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984.
- Lubis, Erni Sari Dwi Devi, dan Ma'arif Jamuin. "Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia." *Suhuf* 27, no. 2 (2015): 161–72.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mufid, Ahmad Syafi'I. *Tangkalukan Abangan dan Tarekat Kebangkitan Agama di Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor, 2006.
- Nalle, Victor Imanuel W. "Asas Contarius Actus pada Perppu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia." *PJIH (Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum)* 4, no. 2 (2017): 244–62.
- Nasir, M. Ridlwan. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Novitasari, Devi. HTI hanya Dicabut Izinnya, Bukan Dibubarkan Pemerintah, 1 Mei 2019.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pub. L. No. Perppu No.2/2017 (2017).
- Qohar, Abdul. "Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran." *Kalam* 11, no. 2 (2017): 366.
- Rafiuddin, Mohamad. "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)." *Islamuna* 2, no. 1 (2015): 29–55.
- Rais, M. Amin. "Kata Pengantar." Dalam *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, disunting oleh John L. Esposito, diterjemahkan oleh Machnun Husein, ix. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Schwarz, Fred. *You Can Trust the Communists*. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1960